

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBINA  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA  
PONTIANAK**



**Program Studi : Pembangunan Sosial**

**Oleh:**

**ISDIANTO**

**NIM E1021211014**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2025**

**SKRIPSI**  
**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBINA**  
**GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA**  
**PONTIANAK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**PONTIANAK**  
**2025**

LEMBAR PERSETUJUAN  
PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBINA GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Isdianto

NIM: E1021211014

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. H. Agus Sikwan, S.H., M.Hum  
NIP.196108081987031006

Tanggal : 10/7/2025

Dosen Pembimbing Pendamping



Yulianti, S.H., M.Si  
NIP.196007171988102001

Tanggal : 8/7/2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBINA GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

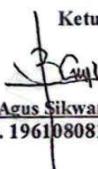
ISDIANTO

NIM: E1021211014

Dipertahankan di : Pontianak  
Pada Hari/Tanggal : Jum'at / 18 Juli 2025  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang 04

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. H. Agus Sikwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196108081987031006

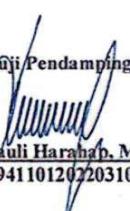
Sekretaris

  
Yulianti, S.H., M.Si  
NIP. 196007171988102001

Penguji Utama

  
Dr. Herlan, S.Sos., M.Si  
NIP. 197205212006041001

Penguji Pendamping

  
Reiki Nauli Harahap, M.A.  
NIP. 199411012022031008



## ABSTRAK

Isdianto. E1021211014. Peran Dinas Sosial Dalam Membina Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pontianak. Skripsi. Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Sosial dalam membina gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan perannya, secara fasilitatif (penyediaan kebutuhan dasar), edukatif (peningkatan kapasitas diri), representasional (koordinasi antar Instansi), dan teknis (penanganan kasus). Namun, pembinaan ini masih menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi uang di jalan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta lemahnya sanksi dalam regulasi. Kesimpulannya, meskipun Dinas Sosial memiliki peran penting, hasil pembinaan belum optimal karena adanya hambatan yang dihadapi. Sebagai rekomendasi, disarankan untuk memperkuat regulasi, mengintensifkan edukasi publik, dan meningkatkan dukungan sumber daya guna mewujudkan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak.

Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Membina, Gelandangan, Pengemis, Kota Pontianak.

## ABSTRACT

Isdianto. E1021211014. The Role of the Social Affairs Office in Guiding the Homeless and Beggars in Pontianak City. Undergraduate Thesis. Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

This study analyzes the role of the Social Affairs Office in guiding the homeless and beggars in Pontianak City. A descriptive qualitative approach is employed to describe and analyze both the roles undertaken by the Social Affairs Office and the obstacles it encounters. The findings revealed that the Social Affairs Office has fulfilled its roles in several aspects: facilitative (providing basic needs), educative (improving self-capacity), representational (coordinating among institutions), and technical (handling individual cases). However, the guidance programs still faced significant challenges, such as the lack of public awareness to refrain from giving money on the streets, limited budget and human resources, and weak regulatory sanctions. In conclusion, although the Social Affairs Office played an important role, the outcomes of the guidance efforts remained suboptimal due to these existing barriers. As a recommendation, it is advised to strengthen regulations, intensify public education, and improve resource support to realize a more effective and sustainable approach to guiding the homeless and beggars in Pontianak City.

**Keywords:** Role of the Social Affairs Office, Guidance, Homeless, Beggars, Pontianak City.



## RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Peran Dinas Sosial Dalam Membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak*” Judul ini dipilih karena fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak masih menjadi isu sosial yang kompleks. Keberadaan mereka sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi ketertiban dan kesejahteraan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, menjadi sangat penting dalam upaya pembinaan untuk mengembalikan mereka ke fungsi sosial yang normal.

Penelitian ini menggunakan teori Jim Ife (2008) dengan jenis penelitian kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran Dinas Sosial dalam membina gelandangan dan pengemis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pontianak telah menjalankan berbagai peran dalam membina gelandangan dan pengemis. Peran ini mencakup aspek fasilitatif (penyediaan kebutuhan dasar seperti rumah singgah, makanan, dan akses kesehatan), edukatif (pemberian bimbingan mental, spiritual, kesehatan, dan pelatihan keterampilan), representasional (menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil untuk penjangkauan, pengurusan identitas, dan rujukan), serta teknis (pendataan komprehensif, asesmen mendalam, dan penentuan tindakan yang sesuai, termasuk upaya reintegrasi ke keluarga atau panti sosial).

Demikian, proses pembinaan ini tidak lepas dari hambatan yang dihadapi beberapa hambatan utamanya meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang langsung kepada gelandangan dan pengemis, serta keterbatasan sumber daya manusia yang. Selain itu, lemahnya sanksi yang diatur dalam peraturan yang berlaku juga menjadi kendala, karena kurang memberikan efek jera kepada mereka, sehingga seringkali gelandangan dan pengemis kembali kejalan setelah dibina.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pontianak telah menjalankan peran nya dalam membina gelandangan dan pengemis. Implementasi peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis menunjukkan komitmen dinas dalam menangani masalah sosial ini. Meskipun demikian, proses pembinaan masih terhambat oleh faktor *internal* dan *eksternal*, terutama kurangnya dukungan masyarakat untuk tidak memberikan uang dan kendala regulasi/peraturan yang belum memberikan efek jera.

Untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial, disarankan beberapa hal penguatan regulasi dan penegakan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera, intensifikasi kampanye edukasi kepada masyarakat agar tidak memberi uang di jalan dan menyalurkan bantuan melalui saluran yang tepat, peningkatan alokasi anggaran untuk fasilitas dan program pembinaan yang lebih mendalam, serta penambahan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Sosial.

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Isdianto

Nomor Mahasiswa : E1021211014

Program Studi : Pembangunan Sosial

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang dimaksudkan pada saat penulisan skripsi ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pontianak, 10 Juli 2025

Yang bertandatangan dibawah ini



NIM. E1021211014

## **MOTO**

"Dengan Ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan seni hidup menjadi lebih indah, dan dengan Agama hidup menjadi lebih terarah"

(KH Zainuddin Mz)

“Masa Depan Berkelas Menghasilkan Cinta Yang Berkualitas”

(Isdianto)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri, bentuk penghargaan atas perjuangan telah kuat dan mampu untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab pendidikan tepat waktu walau jika dilihat kebelakang banyak sekali tantangan yang dihadapi tetapi ini bentuk dari pada proses untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Nurhadi, dan Ibu Siti Istiqomah yang telah senantiasa menyayangi, mendukung, memotivasi, serta mendoakan saya agar menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan mereka di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, yang tak akan bisa dinilai dan takkan bisa tergantikan.
3. Keluarga Saya, Kepada adik saya Candra Kurniawan dan Muhammad Daffa yang senantiasa menyemangati abangnya dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala juga Berkah, rahmat dan hidayah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Peran Dinas Sosial Dalam Membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak*" dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi yang disusun sebagai tugas akhir yang merupakan kewajiban harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. H Agus Sikwan, SH, M.Hum sebagai pembimbing pertama, dan Ibu Yulianti, S.H., M.Si sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, motivasi dan membimbing selama proses penggerjaan skripsi ini, baik secara metologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karna itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Nurwijayanto, SH, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial.

3. Ibu Dr. Hj. Hasanah, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulisan menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
  4. Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji pertama dan bapak Reiki Nauli Harahap, M.A, CSP, CSRA. Selaku dosen penguji kedua yang sudah memberikan arahan, motivasi serta bimbingan selama proses penulisan, baik secara metodologi penelitian maupun literatur – literatur lain yang berkaitan dengan penulisan ini.
  5. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah mendidik saya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan yang selalu sabar dalam melayani segala administrasi yang dibutuhkan.
  6. Rekan-rekan Angkatan Heracles angkatan 2021 yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan dari Prodi Pembangunan Sosial.
  7. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
  8. Pegawai dan Masyarakat yang telah bersedia berbagi cerita dalam melakukan wawancara untuk bahan penelitian skripsi.
- Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari ALLAH SWT. Penulis juga menyadari

kekurangan dari skripsi ini maka dari itu penulis mohon saran dan keritiknya dari berbagai pihak untuk membangun skripsi ini menjadi lebih baik. harapan dari penulis semoga penelitian ini bermanfaat untuk penulis dan juga pembaca.

Pontianak, 10 Juli 2025

Isdianto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<i>ABSTRACT .....</i>	Error! Bookmark not defined.
<b>RINGKASAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Fokus Penelitian .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.6.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori dan Konsep .....	10
2.1.1 Teori Peran .....	10
2.1.2 Konsep Pembinaan .....	11
2.2 Definisi Gelandangan dan Pengemis.....	16

2.2.1 Definisi Gelandangan .....	16
2.2.2 Definisi Pengemis.....	17
2.2.3 Persamaan Gelandangan dan Pengemis .....	18
2.2.4 Perbedaan Gelandangan dan Pengemis .....	18
2.3 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2021 .....	20
2.4 Peran Dinas Sosial.....	20
2.5 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial .....	21
2.5.1 Strategi dan Program .....	21
2.6 Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan.....	22
2.7 Hasil Penelitian yang Relevan.....	23
2.8 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
2.9 Kerangka Konseptual .....	28
2.9.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	28
2.9.2 Hubungan Antar Konsep .....	29
2.9.3 Penggunaan untuk Analisis Data.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	32
3.2.1 Presurvey .....	32
3.2.2 Kajian Kepustakaan.....	32
3.2.3 Penelitian Lapangan.....	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3.1 Lokasi Penelitian .....	34
3.3.2 Waktu Penelitian.....	34
3.4 Subjek Penelitian dan Objek Penulisan.....	35

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
3.7 Instrumen Penelitian.....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Pontianak .....	43
4.2 Gambaran Dinas Sosial Kota Pontianak .....	47
4.2.1 Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pontianak .....	49
4.2.2 Fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak .....	50
4.2.3 Susunan Organisasi Dinas Sosial .....	51
4.3 Struktur Dinas Sosial Kota Pontianak .....	52
4.4 Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pontianak .....	53
4.5 Identitas Informan .....	56
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	57
5.2 Peran Dinas Sosial dalam Membina Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak.....	58
5.3 Upaya Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis .....	66
5.4 Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak.....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	78
6.3 Keterbatasan Penelitian .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak .....	5
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	34
Tabel 3. 2 Data Informan .....	36
Tabel 4. 1 Nama Informan Penelitian .....	56
Tabel 5. 1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak .....	66
Tabel 5. 2 Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis ....	70
Tabel 5. 3 Jumlah Anggaran Pelayanan dan Rehabilitasi .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	27
Gambar 4. 1 Letak dan Batas Wilayah Kota Pontianak.....	44
Gambar 4. 2 Luas Wilayah Kota Pontianak.....	45
Gambar 4. 3 Dinas Sosial Kota Pontianak.....	47
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	1
Lampiran 2. Daftar Nama Informan.....	5
Lampiran 3. Pedoman Observasi .....	6
Lampiran 4. Foto Bersama Informan .....	7
Lampiran 5. Surat Tugas.....	12
Lampiran 6. Biodata Penulis .....	13

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama suatu negara. Sebuah negara tidak bisa dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan sosial warganya masih rendah. Terdapat berbagai faktor yang menghambat pencapaian kesejahteraan sosial, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya fasilitas kesehatan, tingginya angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama yang saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah.

Peningkatan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui pembangunan yang seimbang, baik pada aspek fisik maupun non-fisik. Saat ini, upaya pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Kementerian Sosial (Kemensos) turut berperan dengan mengupayakan terciptanya kesejahteraan sosial, yang terlihat melalui berbagai inisiatif untuk memberantas penyebab kemiskinan Menurut Sulistiyani dalam penelitian (Hidayatullah & Suminar, 2019) kemiskinan di definisikan sebagai kondisi di mana masyarakat hidup dalam keterbatasan, baik dalam akses terhadap faktor produksi, peluang usaha, pendidikan, maupun fasilitas lainnya. Hal ini mengakibatkan setiap upaya dan aktivitas mereka menjadi sangat terbatas.

Penyebab kemiskinan sering kali terkait dengan ketiadaan penghasilan tetap atau pekerjaan yang layak, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat seseorang dalam mencari pekerjaan. Kemiskinan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan norma-norma kehidupan. Beberapa konsekuensi dari kemiskinan meliputi ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan berkualitas, kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, ketidakcukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kurangnya jaminan bagi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberantasan kemiskinan.

Pemberdayaan secara teoritis sangat tergantung kepada dua aspek yaitu kekuatan intervensi dari eksternal dan kekuatan internal. Tetapi seperti diketahui bahwa banyaknya program dan model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dominan pada kebijakan bantuan seperti paket sembako dan sejenisnya. Sehingga yang perlu dilakukan ialah bagaimana pemerintah dapat memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan kondisi masyarakat, bukan hanya dengan memberikan bantuan tetapi bisa lebih fokus untuk di bina sehingga mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Model pemberdayaan seperti itu tentunya akan berdampak pada ketergantungan masyarakat bukan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan yang sampai saat ini dirasa mampu memberikan kontribusi baik jangka pendek maupun panjang ialah dengan pembelajaran dan pendekatan secara partisipatif pada kelompok masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Sistem dan pola

seperti ini dapat meningkatkan potensi masyarakat secara berkesinambungan dan tentunya masyarakat akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan skil mereka sendiri. keberadaan pengemis khususnya di kota-kota besar sangatlah banyak dan telah membentuk komunitas, dikarenakan menurut mereka menjadi pengemis bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar dibandingkan dengan mereka harus bekerja.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah harus diarahkan secara tepat dalam mengatasi kemiskinan, fokus utama adalah kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan Permendes No. 05 Tahun 2019, kategori PPKS mencakup berbagai kelompok, antara lain anak balita telantar, anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas narapidana, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran yang mengalami masalah sosial, serta korban bencana alam dan sosial. Selain itu, termasuk pula perempuan yang rentan secara sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga dengan masalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil. Dari berbagai jenis tersebut, salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Sosial adalah upaya pengurangan jumlah gelandangan dan pengemis (Yunus, 2021). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2019 jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia mencapai 77.500 jiwa.

Angka tersebut masih perlu diteliti kembali mengingat kelompok gelandangan dan pengemis ini memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga data rilnya dapat saja lebih tinggi.

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Gelandangan dan pengemis tidak hanya mempengaruhi estetika kota tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih dalam. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut.

Kota Pontianak sebagai salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini, telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis. Berkennaan dengan tindakan mengemis di atur dalam ketentuan larangan yaitu Pasal 42 Huruf e yang berisi Setiap orang atau badan dilarang memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta minta belas kasihan orang di persimpangan jalan dan tempat umum lainnya. Adapun sanksi untuk yang memberi dikenakan pasal 63 ayat 1 Huruf ss yang berbunyi sanksi untuk pelanggaran pasal 42 huruf e adalah denda sebesar RP 500.000 Peraturan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif melalui berbagai langkah, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi sosial terkait masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak.

Kualitas pelaksanaan ini sangat tergantung pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, studi tentang bagaimana kebijakan ini di implementasikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak menjadi sangat penting.

Penelitian ini akan membahas terkait peran dan upaya Dinas Sosial dalam membina Gelandangan dan pengemis, serta hambatan yang dihadapi.

Meskipun Peraturan Kota Pontianak No. 19 tahun 2021 telah diimplementasikan selama beberapa tahun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Beberapa studi terdahulu mungkin telah menyoroti aspek-aspek kebijakan sosial secara umum, namun kajian khusus yang mendalam mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak masih sangat terbatas.

**Tabel 1. 1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2019	10	0	10
2	2020	19	2	21
3	2021	26	16	42
4	2022	32	11	43
5	2023	15	12	27
6	2024	13	7	20

(Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2019-2024)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah Gelandangan dan pengemis yang dilayani di Dinas Sosial ini meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 11 laki-laki dan perempuan, dari tahun 2020-2021 terjadi peningkatan sebanyak 21 laki-laki dan perempuan, dari tahun 2021-2022 terjadi peningkatan sebanyak 1 laki-laki dan dari tahun 2022-2023 terjadi penurunan sebanyak 16 laki-laki dan perempuan. Dari tahun 2023-2024 terjadi penurunan sebanyak 7 laki-laki dan perempuan.

Dapat dilihat dari tabel diatas pentingnya pembinaan dari Institusi Pemerintah terhadap Gelandangan dan Pengemis dalam hal ini yang memiliki tugas membina yaitu dibidang sosial yaitu bidang rehabilitasi yang menjadi tugas dari Dinas Sosial untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, dalam kehidupan kedepannya diharapkan setelah dilakukan pembinaan dengan program program yang baik adanya kemandirian dari mereka yang dibina sehingga kehidupan mereka bisa jauh lebih baik dan tidak kembali lagi menjadi gepeng. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pontianak dalam membina gelandangan dan pengemis, pelaksanaan program apa saja yang telah dilakukan, serta hambatan hambatan apa saja yang dihadapi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi dari penelitian ini adalah :

1. Gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak menimbulkan permasalahan sosial
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis

### **1.3 Fokus Penelitian**

Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam fokus penelitian ini meliputi:

1. Untuk melihat peran dan tanggung jawab Dinas Sosial dalam membina gelandangan dan pengemis.
2. Untuk menganalisis upaya Dinas Sosial dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
3. Menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana peran Dinas Sosial dalam membina gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Dinas sosial dalam membina gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak.
2. Untuk menganalisis upaya Dinas Sosial dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat

teoritis dan manfaat praktis.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya terkait kebijakan publik, sosiologi, dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas peran pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis.
2. Landasan untuk Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang ingin mengkaji topik serupa, baik dalam konteks daerah lain maupun dalam analisis yang lebih mendalam mengenai program pembinaan sosial.
3. Pemahaman Teoretis tentang Pembinaan Sosial: Penelitian ini memberikan wawasan teoritis tentang konsep pembinaan sosial, efektivitas intervensi pemerintah, serta hubungan antara kebijakan sosial dan kesejahteraan individu yang berada di bawah garis kemiskinan.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Sosial Kota Pontianak dan pemerintah daerah lainnya dalam mengevaluasi serta mengoptimalkan program pembinaan gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.

2. Pengembangan Program Pembinaan: Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan program-program pembinaan, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi gelandangan dan pengemis.
3. Pemahaman bagi Masyarakat: Masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial ini. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu gelandangan dan pengemis serta peran yang bisa mereka ambil dalam mendukung program pembinaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi pengembangan teori maupun penerapan praktis dalam konteks pembinaan sosial, khususnya untuk menangani masalah yang terjadi pada gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak.